

# Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

## *Good Corporate Governance Implementation Report*

Komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) merupakan hal yang mutlak bagi Bank Papua. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan infrastruktur yang dimiliki dan secara berkesinambungan meningkatkan sistem dan prosedur untuk mendukung efektifitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di Bank Papua.

### Pernyataan Komitmen GCG Bank Papua

Bank Papua bekomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yakni Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran sebagai dasar peningkatan kinerja Perseroan dengan secara terus menerus melakukan pemutakhiran berbagai pedoman, *standard operational procedure (SOP)*, manual sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perkembangan Perusahaan.

Bank Papua secara berkelanjutan dalam praktik Tata Kelola Perusahaan berupaya untuk melakukan pemberian pada segala aspek termasuk penyediaan Pedoman Pelaksanaan yang diterapkan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan, Bank Papua telah memiliki pedoman pelaksanaan berupa Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Good Corporate Governance* yang diatur dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 101.A/DIR-BPD/XI/2013 tanggal 29 November 2013.

Untuk mewujudkan dan memperkuat kondisi Bank Papua, Manajemen dari waktu ke waktu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua yang baik dan benar dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi untuk menjadikan Bank Papua menjadi Bank yang sehat, kuat, unggul dan terpercaya baik ditingkat Lokal, Regional dan Nasional sebagaimana yang terkandung dalam Visi dan Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

*The commitment to implementing corporate governance (GCG) is an absolute thing for Bank Papua. This is done through strengthening the infrastructure owned and continuously improving the systems and procedures to support the effectiveness of GCG implementation at Bank Papua.*

### *Statement of Bank Papua GCG Commitments*

*Bank Papua is committed to implementing the principles of GCG, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness as a basis for improving the Company's performance by continuously updating various guidelines, standard operational procedures (SOP), manuals in accordance with the changes in applicable laws and regulations, and the development of the Company.*

*Bank Papua continuously in governance practices strives to make improvements in all aspects including the provision of Implementation Guidelines that are applied to all levels or levels of the organization. In implementing governance, Bank Papua has had an implementation guideline in the form of a Corporate Manual (BPP) Good Corporate Governance which is regulated by a Decree of the Board of Director Number: 101.A / DIR-BPD / XI / 2013 dated 29 November 2013.*

*To realize and strengthen the condition of the Bank Papua, Management from time to time is committed to continuously improve the quality of the implementation of good and correct Bank Papua Governance in all business activities of the Bank at all organizational levels to make the Bank Papua a sound, strong, superior bank and trusted both at the Local, Regional and National levels as contained in the Vision and Mission of Papua Regional Development Bank,Ltd..*

## Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik yang tercermin di setiap kegiatan usaha merupakan perwujudan visi Bank Papua untuk menjadi bank pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja, serta misi Bank Papua untuk menjadi acuan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Bank Papua meyakini bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang menyeluruh di setiap jenjang organisasi akan sangat mendukung upaya Bank Papua dalam mewujudkan sasaran bisnis serta memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam jangka panjang.

Untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan diperlukan landasan yang kuat bagi sebuah perusahaan. Untuk itu penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai kerangka utama dari pertumbuhan perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dengan berlandaskan pada prinsip TARIF :

- Keterbukaan (*Transparency*)
- Akuntabilitas (*Accountability*)
- Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
- Kemandirian (*Independency*)
- Kewajaran/Kesetaraan (*Fairness*)

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan di Bank Papua dapat diuraikan sebagai berikut.

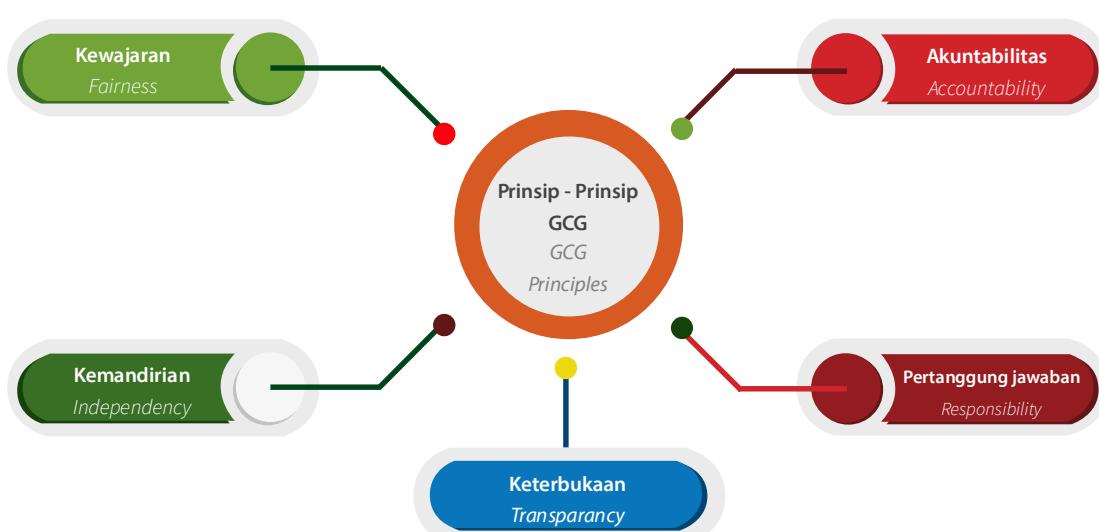
## Good Corporate Governance Principles

*The application of the good governance principles reflected in each business activity is a manifestation of the vision of Bank Papua to become the community of choice banks that excel in service and performance, and the mission of Bank Papua to become a reference for good governance. Bank Papua believes that the implementation of comprehensive good governance at every level of the organization will greatly support the efforts of Bank Papua in realizing business targets and providing benefits to all stakeholders in the long term.*

*Realizing sustainable growth requires a strong foundation for a company. For this reason, the application of good governance as the main framework of company growth must be applied consistently and sustainably based on the principle of TARIF:*

- Transparency
- Accountability
- Responsibility
- Independence (independency)
- Fairness / Fairness

*The application of the principles of governance at Bank Papua can be described as follows.*



## Transparansi

Bank diharuskan memiliki inisiatif dalam pengungkapan informasi material dan relevan baik yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maupun informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi tersebut disampaikan dengan cepat, akurat, dan mudah diakses oleh siapapun. Komitmen dalam mewujudkan prinsip transparansi ditunjukkan oleh Bank Papua antara lain melalui:

1. Memiliki Divisi Sekretaris Perusahaan yang memiliki kewajiban untuk memastikan informasi perusahaan yang relevan telah tersampaikan kepada pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan masyarakat.
2. Memiliki website resmi perusahaan yang selalu diperbarui dalam menyajikan informasi sesuai standar transparansi dan publikasi yang ditetapkan oleh Regulator.
3. Senantiasa mengedepankan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan dan pengungkapan kondisi keuangan dan non keuangan secara tepat waktu kepada pemangku kepentingan.
4. Mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
5. Senantiasa menyajikan dan menyampaikan laporan kepada otoritas yang berwenang dan kepada pihak-pihak lainnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku secara tepat waktu.

## Akuntabilitas

Pengelolaan Bank Papua harus dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan Bank dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Perwujudan dari prinsip Akuntabilitas di Bank Papua tercermin antara lain melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Memiliki pedoman atau kebijakan yang menjadi pegangan bagi setiap organ perusahaan dan semua pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

## Transparency

*Banks are required to have initiatives in the disclosure of material and relevant information whether required by legislation or other important information that can influence decision making by shareholders, creditors and other stakeholders. This information is delivered quickly, accurately, and is easily accessible to anyone. Commitment in realizing the principle of transparency is demonstrated by Bank Papua, among others through:*

1. *Having a Corporate Secretary Division that has an obligation to ensure relevant company information has been conveyed to stakeholders, including shareholders and the public.*
2. *Has an official company website that is always updated in presenting information according to transparency standards and publications set by the Regulator.*
3. *Always prioritize openness in corporate management and disclosure of financial and non-financial conditions in a timely manner to stakeholders.*
4. *Disclose information that includes but is not limited to vision, mission, business objectives, corporate strategy, financial conditions, composition and compensation of management, controlling shareholders, share ownership by members of the Board of Director and members of the Board of Commissioners and their family members in other companies and companies, risk management system, supervision system and internal control, system and implementation of good governance and level of compliance, and important events that can affect the condition of the company.*
5. *Always present and submit reports to the competent authorities and to other parties as applicable legal provisions in a timely manner.*

## Accountability

*Management of Bank Papua must be carried out correctly, measurably, and in accordance with the interests of the Bank while taking into account the interests of shareholders and other stakeholders. The embodiment of the Accountability principle at Bank Papua is reflected, among others, through the following:*

1. *Having a guideline or policy that is a guideline for every organ of the company and all employees in carrying out their duties and responsibilities.*

2. Menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua pegawai secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.
3. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua pegawai memiliki kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
4. Memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
5. Memiliki unit kerja yang mengelola anti *fraud*.
6. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan serta rencana kerja lainnya.
7. Memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

### Pertanggungjawaban

Pengelolaan usaha Bank harus dipastikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Selain itu Pertanggungjawaban Bank juga berbentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini Bank Papua mewujudkannya prinsip Pertanggungjawaban antara lain melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Senantiasa bertindak dengan prinsip kehati-hatian dan berpegang teguh pada hukum yang berlaku.
2. Memiliki kebijakan internal Bank sebagai panduan dan pedoman bagi pegawai dalam menjalankan aktivitas operasional Bank.
3. Memiliki Divisi Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan yang berfungsi sebagai ***second line of defense (ex ante)*** yaitu senantiasa memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap Komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
4. Senantiasa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan melalui implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

2. Establish details of the duties and responsibilities of each company organ and all employees clearly and in harmony with the company's vision, mission, values, and strategy.
3. Believing that all corporate organs and all employees have the ability according to their duties, responsibilities, and roles in implementing good governance.
4. Having an effective internal control system in managing the company.
5. Has a work unit that manages anti fraud.
6. Prepare the Company's Long Term Plan, Work Plan and Annual Budget and other work plans.
7. Have performance measures for all levels of the company that are consistent with the company's business objectives, and have a reward and punishment system.

### Responsibility

The management of the Bank's business must be ensured in accordance with the applicable laws and regulations, the principles of sound Bank management. In addition, Bank Accountability also takes the form of concern for the environment and the surrounding community. In this case Bank Papua embodies the principle of accountability, among others, through the following matters:

1. Always act with the prudential principle and stick to the applicable law.
2. Has Bank internal policies as guidelines and guidelines for employees in carrying out the Bank's operational activities.
3. Has an Internal Audit Division, a Compliance Unit that functions as a ***second line of defense (ex ante)***, namely ensuring that policies, provisions, systems and procedures as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of Bank Indonesia, the Financial Services Authority and applicable laws and regulations, as well as ensuring the Bank's compliance with the Commitments made by the Bank to Bank Indonesia and / or other authorized supervisory authorities.
4. Always make a positive contribution to the community and care about environmental sustainability through the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR).

## Kemandirian

Dalam mewujudkan prinsip Kemandirian, manajemen dan seluruh individu dalam Bank memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank. Prinsip ini dipegang teguh oleh Bank Papua dalam hal :

1. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua.
2. Mayoritas anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Direktur Utama maupun Direktur lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, karena tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali.
3. Bank telah memiliki aturan mengenai Benturan Kepentingan yang diatur di dalam Kode Etik Bank Papua sejak tahun 2004.

## Kewajaran Dan Kesetaraan

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) dipegang teguh oleh Bank Papua yang diwujudkan dalam setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan, perwujudan prinsip Kewajaran dan Kesetaraan di Bank Papua antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
2. Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

## Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Sebagai dasar acuan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Bank Papua berpedoman pada berbagai peraturan perundangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia tentang Perbankan;
2. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum.

## Professional

*In realizing Professional principles, management and all individuals in the Bank have competence, are able to act objectively, and are free from influence / pressure from any (independent) party and have a high commitment to develop the bank. This principle is held by Bank Papua in terms of:*

1. *The composition of the Board of Director and the Board of Commissioners does not have family relations with each other up to the second degree.*
2. *The majority of the members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners. The President Director and other Board of Director are from parties that are independent of the controlling shareholders, because they do not have financial, management, share ownership and / or family relations with the controlling shareholders.*
3. *The Bank has rules regarding Conflict of Interest which are regulated in the Bank Papua Code of Conducts since 2004.*

## Fairness and Equality

*The Principles of Fairness and Fairness held firmly by Bank Papua which are realized in every decision taken always pay attention to the interests of the majority shareholders and provide protection to minority shareholders and other stakeholders from engineering and transactions that conflict with applicable laws and regulations. Overall, the realization of the principle of Fairness and Equality at Bank Papua includes, among others, the following:*

1. *Paying attention to the interests of all stakeholders based on the principle of equality and fairness (**equal treatment**).*
2. *Providing opportunities for all stakeholders to provide input and express opinions for the interests of the Bank and open access to information in accordance with the principle of transparency.*

## Basic Implementation of Good Governance

*As a basis for reference in implementing good governance, Bank Papua is guided by various laws and regulations, including the following:*

1. *Law of the Republic of Indonesia concerning Banking;*
2. *Law concerning Limited Liability Companies;*
3. *Financial Services Authority Regulation concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.*

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
8. Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum;
9. Surat Edaran OJK tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti;
10. Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
11. Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, serta Komite-Komite Dewan Komisaris;
13. ASEAN **Good Corporate Governance Scorecard**;
14. Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Indonesia dan Tata Kelola Perusahaan Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
15. Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Dalam praktiknya, Bank Papua juga senantiasa mengikuti perkembangan terkini dan praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan yang berlaku, serta memperhatikan etika dan praktik bisnis terbaik.

## Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua

Perseroan mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan sebagai sebuah strategi fundamental dalam melakukan transformasi dan **turn around**, yang diharapkan dapat menciptakan Bank Papua sebagai sebuah perusahaan yang berkelanjutan (**sustainable company**). Untuk itu, dengan menerapkan GCG, Bank Papua bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Kinerja, Layanan Bank serta efisiensi yang dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholders* yakni: Pemegang saham, Pemerintah, Nasabah dan Masyarakat lainnya.
2. Meningkatkan reputasi Bank dan Kepercayaan Masyarakat
3. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar dengan penerapan prinsip TARIF:

4. Regulation of the Financial Services Authority concerning Assessment of Soundness Levels of Commercial Banks;
5. Financial Services Authority Regulation concerning Bank Business Plans;
6. Regulation of the Financial Services Authority concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks;
7. Regulation of the Financial Services Authority concerning Capability and Compliance Assessment for Main Parties of Financial Service Institutions;
8. OJK Circular Letter concerning Implementation of Governance for Commercial Banks;
9. OJK Circular Letter concerning Commercial Bank Business Activities Based on Core Capital;
10. OJK Circular Letter concerning Implementation of Governance in Giving Remuneration for Commercial Banks;
11. OJK Circular Letter concerning Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates;
12. Financial Services Authority Regulations governing SGM, Board of Director and Board of Commissioners, and Committees of the Board of Commissioners;
13. ASEAN **Good Corporate Governance Scorecard**;
14. General Guidelines for Indonesian GCG and Indonesian Banking GCG by the National Committee on Governance Policy (KNKG)
15. Articles of Association of Papua Regional Development Bank,Ltd..

In practice, Bank Papua also keeps up to date with the latest developments and best practices in governance, and takes into account the best ethics and business practices.

## The Purpose of Implementing Bank Papua Governance

The Company implements GCG as a fundamental strategy in transforming and **turning around**, which is expected to create Bank Papua as a **sustainable company**. For this reason, by implementing GCG, Bank Papua aims to:

1. Improving Bank Performance, Services and efficiency that can provide added value to stakeholders, namely: Shareholders, Government, Customers and other Communities.
2. Improve the Bank's reputation and community trust
3. Increase the seriousness of management in applying the principles of good and right governance by applying the principle of TARIF:

- Keterbukaan (*Transparency*)
  - Akuntabilitas (*Accountability*)
  - Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
  - Kemandirian (*Independency*)
  - Kewajaran/Kesetaraan (*Fairness*)
- serta kehati-hatian dalam pengelolaan Bank.
4. Meningkatkan Kepatuhan Bank terhadap Hukum serta Peraturan dan Ketentuan yang berlaku sehingga Bank dapat terlindungi dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.

## Kebijakan Dan Pedoman Pendukung Tata Kelola Perusahaan

Bank Papua telah memiliki kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung berjalannya praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kebijakan dan pedoman tersebut diantaranya :

1. Pedoman *Code of Corporate Governance* (CoCG),
2. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*),
3. Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Manual Board*),
4. Piagam Komite Audit (*Committee Audit Charter*),
5. Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),
6. Pedoman Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest/CoI*),
7. Pedoman Penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (Gratifikasi),
8. Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*),
9. Pedoman Manajemen Risiko,
10. Pedoman Remunerasi dan Nominasi,
11. Pedoman *Corporate Social Responsibility* (CSR),
12. Pedoman Hubungan Koresponden,
13. Pedoman Strategi Anti Fraud,
14. Pedoman Perkreditan,
15. Pedoman Layanan Produk,
16. Pedoman Kepatuhan,
17. Pedoman Logistik dan Material,
18. Pedoman Sumber Daya Manusia.

## Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan

- *Transparency*
  - *Accountability*
  - *Responsibility*
  - *Independence (independency)*
  - *Fairness / Fairness*
- and prudence in the management of the Bank.*
4. *Increasing Bank Compliance with Laws and applicable Regulations and Conditions so that the Bank can be protected from external interventions and lawsuits.*

## Policies and Guidelines for Supporting Corporate Governance

*Bank Papua has had policies and guidelines for implementing activities in order to support the implementation of Good Corporate Governance practices. These policies and guidelines include:*

1. *Code of Corporate Governance (CoCG) Guidelines*,
2. *Code of Business Ethics and Code of Conduct*,
3. *Working Guidelines for the Board of Commissioners and Board of Director (Manual Board)*,
4. *Charter of the Audit Committee (Audit Committee Charter)*,
5. *Guidelines for State Operator Wealth Reporting (LHKPN)*,
6. *Conflict of Interest Guidelines*,
7. *Guidelines for Receiving Gifts / Souvenirs and Entertainment (Gratification)*,
8. *Charter of Internal Audit (Internal Audit Charter)*,
9. *Risk Management Guidelines*,
10. *Remuneration and Nomination Guidelines*,
11. *Guidelines for Corporate Social Responsibility (CSR)*,
12. *Guidelines for Correspondent Relations*,
13. *Anti-Fraud Strategy Guidelines*,
14. *Credit Guidelines*,
15. *Product Service Guidelines*,
16. *Compliance Guidelines*,
17. *Guidelines for Logistics and Materials*,
18. *Guidelines for Human Resources*.

## Submission of State Organizer Assets Report (LHKPN)

*State Operator Assets Report (LHKPN) is a list of all State Administrators' assets as outlined in the LHKPN form stipulated by the Corruption Eradication Commission (KPK). LHKPN does not only cover the assets of a state administrator, but also nuclear families such as spouses and children who are still dependent on the LHKPN have a legal basis so that state administrators are required*

LHKPN memiliki dasar hukum sehingga penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN mereka. Pertama adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dasar hukum lainnya adalah Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara.

Atas dasar hukum tersebut, setiap Penyelenggara Negara wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, baik sebelum menjabat, selama menjabat atau bahkan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, pensiun dan juga wajib dalam menginformasikan harta kekayaan

Pada tahun 2018, Direksi Bank Papua telah mengeluarkan Keputusan Direksi Nomor : 15.1/DIR-BPD/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Pengelola LHKPN di Bank Papua adalah Divisi Manajemen Modal Manusia yang dipimpin oleh Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Modal Manusia.

## Program Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi dapat diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ketentuan Pengendalian Gratifikasi Bank Papua diatur dalam Surat Keputusan (SK) Direksi No.69/DIR-BPD/X/2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Dimana dengan diberlakukannya ketentuan tersebut telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berkedudukan di unit kerja Divisi Kepatuhan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi kepatuhan di Bank Papua.

Salah satu bentuk penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik terkait gratifikasi yaitu dengan adanya pengumuman di media website Bank Papua pada tanggal 4 Juni 2018, tentang larangan penerimaan hadiah dalam rangka Hari Raya Idul Fitri

*to report their LHKPN. First is Law Number 28 of 1999 concerning State Administrators that are clean and free of corruption, collusion and nepotism. Another legal basis is Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission and the Corruption Eradication Commission (KPK) Decree Number: KEP.07/KPK/02/2005 concerning Procedures for Registration, Examination and Announcement of Organizers' Wealth Reports.*

*On the basis of these laws, each State Administrator is obliged to be willing to examine his wealth, both before serving, during his term of office or even after taking office. State administrators are also required to report their assets when they first take office, transfer, promotion, pension and also are obliged to inform wealth*

*In 2018, the Board of Director of Bank Papua has issued a Board of Director Decree Number: 15.1 / DIR-BPD / II / 2018 dated 28 February 2018 concerning State Owner's Assets Report in the Papua Regional Development Bank,Ltd.. LHKPN Manager at Bank Papua is the Human Capital Management Division led by the Compliance Division Leader and Human Capital Management Division.*

## Gratuity Control Program

*Gratification can be interpreted as giving in the broadest sense, which includes giving money, goods, discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, travel, free medical treatment and other facilities, both received domestically and in abroad and carried out using electronic means or without electronic means.*

*Provisions for Gratification Control of Bank Papua are regulated in Board of Director' Decree No. 69 / DIR-BPD / X / 2018 concerning Guidelines for Gratification Control in the Papua Regional Development Bank,Ltd.. Where the enactment of this provision has been established a Gratuity Control Unit (UPG) which is domiciled in the Compliance Division work unit which has the task of carrying out the compliance function at Bank Papua.*

*One form of implementation of Good Corporate Governance related to gratuities is the announcement on the media website of Bank Papua on June 4, 2018, about the prohibition on receiving prizes in the framework of Eid Al-Fitr*

# Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Perusahaan yang Baik

## *Implementation of Good Corporate Governance Assessment*

Penilaian faktor Tata Kelola Perusahaan merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan, dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan pada Bank sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Secara berkala, Perseroan melakukan pengukuran implementasi Tata Kelola Perusahaan. Melalui proses pengukuran tersebut, Perseroan bertujuan untuk:

- Menguji dan menilai penerapan Tata Kelola Perusahaan melalui elaborasi kondisi penerapan Tata Kelola Perusahaan dan pembandingan dengan indikator dan parameter pengujian yang telah ditentukan.
- Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan Tata Kelola Perusahaan, berikut rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna mengurangi kesenjangan antara tataran praktik dengan indikator dan parameter pengujian.
- Memantau konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan organisasi Perseroan, serta untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan Tata Kelola Perusahaan.
- Mendorong pengelolaan Perseroan yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroan.

Bank Papua melakukan penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan secara berkala sesuai dengan periode laporan penilaian Tingkat Kesehatan Bank yaitu 2 (dua) kali dalam setahun serta melakukan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum.

*Governance factor assessment is an assessment of the quality of the Bank's management on the implementation of the principles of Governance, taking into account the significance or materiality of a problem with the implementation of Governance in the Bank according to the scale, characteristics and complexity of the Bank's business.*

*Periodically, the Company measures the implementation of GCG. Through the measurement process, the Company aims to:*

- *Test and assess the implementation of GCG through elaboration of the conditions of GCG implementation and comparison with predetermined indicators and testing parameters*
- *Providing an overview of the measurement results through the value of the implementation of GCG, the following recommendations for improvements are proposed, in order to reduce the gap between the level of practice with indicators and testing parameters.*
- *Monitor the consistency of GCG implementation in the Company's organizational environment, as well as to obtain input for the improvement and development of GCG policies.*
- *Encouraging the management of the Company that is increasingly professional, transparent and efficient, as well as empowering functions and increasing the independence of the Company's Organ.*

*Bank Papua periodically evaluates the implementation of Governance in accordance with the period of the Bank's Soundness Assessment report, which is 2 (two) times a year and evaluates the implementation of Governance in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 and Letter Financial Services Authority Circular No.13 / SEOJK.03 / 2017 dated March 17, 2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.*

## Kriteria yang Digunakan dalam Penilaian

Penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Bank Papua menggunakan kriteria dan metodologi yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum, yang terdiri dari 11 (sebelas) kriteria penilaian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, yaitu:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris,
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite,
- Penanganan benturan kepentingan,
- Penerapan fungsi kepatuhan,
- Penerapan fungsi audit intern,
- Penerapan fungsi audit ekstern,
- Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern,
- Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*),
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan pelaporan internal,
- Rencana strategis Bank.

## Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2018 dilakukan secara *self assessment* oleh Divisi Kepatuhan berdasarkan assessment dan data pendukung masing-masing unit kerja terkait dan hasilnya disampaikan kepada Divisi Sekretaris Perusahaan untuk dipublikasikan melalui website Bank Papua ([www.bankpapua.co.id](http://www.bankpapua.co.id)).

## Criteria Used in Assessment

*Assessment of the implementation of Good Corporate Governance at Bank Papua uses the criteria and methodology set out in the Financial Services Authority Circular No. 13 / SEOJK.03 / 2017 dated March 17, 2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, which consists of 11 (eleven) criteria for evaluating the implementation of Governance, namely:*

- *Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Director,*
- *Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners,*
- *Completeness and implementation of Committee duties,*
- *Handling conflicts of interest,*
- *Implementation of compliance function,*
- *Implementation of the internal audit function,*
- *Application of external audit function,*
- *Application of risk management including internal control systems,*
- *Provision of funds to related parties and large exposures,*
- *Transparency of the Bank's financial and non-financial conditions, reports on the implementation of governance and internal reporting,*
- *Bank's strategic plan.*

## The party conducting the assessment

*The assessment of the implementation of 2018 Governance is carried out by a self assessment by the Compliance Division based on the assessment and supporting data of each related work unit and the results are submitted to the Corporate Secretary Division to be published through the Bank Papua website ([www.bankpapua.co.id](http://www.bankpapua.co.id)).*

**Hasil Penilaian Tata Kelola Perusahaan**

Berikut adalah *self assessment* Tata Kelola Bank Papua dalam 4 (empat) tahun terakhir (2015 s/d 2018) :

**Results of Governance Assessment**

*The following is the self assessment of Governance of Bank Papua in the last 4 (four) years (2015 to 2018):*

**Tabel Hasil Self Assessment Tata Kelola Perusahaan***Table of Results of Governance Self Assessment*

<b>Tahun</b>	<b>Skor Assesment</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Definisi Peringkat</b>	<b>Definition of Ranking</b>
2015	2.000	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.	<i>Reflecting that the Bank Management has implemented good corporate governance in general. This is reflected in adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. If there are weaknesses in the application of the principles of Good Corporate Governance, in general these weaknesses are not significant and can be resolved by normal actions by the Bank's management.</i>
2016	2.52	3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank. Karena kelemahan-kelemahan signifikan tersebut akan berdampak terhadap RBB Tahun 2016.	<i>Reflecting that the Bank Management has implemented Good Corporate Governance which is generally quite good. This is reflected in the fulfillment of quite adequate principles of Good Corporate Governance. If there are weaknesses in the application of the principles of Good Corporate Governance, in general these weaknesses are quite significant and require sufficient attention from the management of the Bank. Because these significant weaknesses will have an impact on the 2016 Bank Business Plan.</i>
2017	2,55	3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan. Apabila terdapat kelemahan dan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Bank umum, maka secara umum kelemahan tersebut tidak berdampak signifikan namun memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank. Karena kelemahan-kelemahan tersebut akan berdampak terhadap peran aktif pengawasan bank dan Rencana Bisnis Bank untuk semester II tahun 2017.	<i>Reflecting the Management of the Bank has carried out the implementation of Good Governance in general. This is reflected in adequate fulfillment of the principles of Governance. If there are weaknesses and the application of the principles of Commercial Bank Governance, then in general these weaknesses have no significant impact but require sufficient attention from the bank's management. Because these weaknesses will have an impact on the active role of bank supervision and the Bank Business Plan for the second semester of 2017.</i>
2018	1,55	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan. Apabila terdapat kelemahan dan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Bank Umum, maka secara umum kelemahan tersebut tidak berdampak signifikan namun memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank. Karena kelemahan-kelemahan tersebut akan berdampak terhadap peran aktif pengawasan bank dan Rencana Bisnis Bank untuk semester II tahun 2018.	<i>Reflecting the Management of the Bank has carried out the implementation of Good Governance in general. This is reflected in adequate fulfillment of the principles of Governance. If there are weaknesses and the application of the principles of Commercial Bank Governance, then in general these weaknesses have no significant impact but require sufficient attention from the bank's management. Because these weaknesses will have an impact on the active role of bank supervision and the Bank Business Plan for the second semester of 2018.</i>

Perincian ringkasan *Self Assesment* Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Semester II untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

*Details of summary of Self Assessment The Implementation of Bank Management for Semester II for 2018 are as follows:*

No	Aspek Yang Dinilai	Nilai	Bobot	Perolehan Nilai	Rated aspect
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	1	20 %	0,20	<i>Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Director</i>
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1	10 %	0,10	<i>Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners</i>
3	Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	10 %	0,20	<i>Completeness and Implementation of Committee Duties</i>
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	10 %	0,10	<i>Handling Conflict of Interest</i>
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	5 %	0,10	<i>Implementation of the Bank's Compliance Function</i>
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	5 %	0,10	<i>Application of the Internal Audit Function</i>
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	5 %	0,10	<i>Application of External Audit Functions</i>
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	7.5 %	0,15	<i>Application of the Risk Management Function including the Internal Control System</i>
9	Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar	2	7.5 %	0,15	<i>Prudential Principle in Provision of Funds to Related Parties and Provision of Large Funds</i>
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal	2	15 %	0,30	<i>Transparency of Financial and Non-Financial Conditions, Report on Implementation of GCG and Internal Reporting</i>
11	Rencana Strategis Bank	1	5 %	0,05	<i>Bank Strategic Plan</i>
<b>Nilai Komposit   Predikat</b>		<b>100 %</b>	<b>1,55   2</b>		

#### Analisis

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang secara umum **Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan. Apabila terdapat kelemahan dan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Bank Umum, maka secara umum kelemahan tersebut tidak berdampak signifikan namun memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank. Karena kelemahan-kelemahan tersebut akan berdampak terhadap peran aktif pengawasan bank dan Rencana Bisnis Bank untuk semester II Tahun 2018.

*Reflecting the Management of the Bank has carried out the implementation of **Good** Governance in general. This is reflected in adequate fulfillment of the principles of Governance. If there are weaknesses and the application of the principles of Commercial Bank Governance, then in general these weaknesses have no significant impact but require sufficient attention from the bank management. Because these weaknesses will have an impact on the active role of bank supervision and the Bank Business Plan for the second semester of 2018.*

## Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Tahun Sebelumnya

Tahun 2018 tidak ada rekomendasi.

## Recommendations and Follow-Up of Previous Year Assessment Results

*In 2018 there were no recommendations.*